



RENSTRA

2024 - 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat serta hidayahNya, maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Perencanaan Strategis ini akan senantiasa dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kominfo di Kabupaten Bangkalan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan masih terdapat kekurangan- kekurangan dengan kerendahan hati kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak khususnya Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Akademisi dan *Stakeholder* untuk kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Dokumen Renstra ini.

Bangkalan, 14 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 198703 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	42
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	48
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk masa 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyiapkan rencana strategis yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026. Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Dalam pelaksanaannya rencana strategis harus dijabarkan kembali ke dalam dokumen rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek diantaranya kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan yang berkualitas

Sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melaksanakan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Diharapkan ketiga urusan pemerintahan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tercapainya visi-misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang

:aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 Nomor 18 / E);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- 1) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 2024 - 2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

- 2) Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2 Tujuan

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan secara terukur.
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.4. Penentuan Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah :

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan *data center* dan *disaster recovery center*;
5. Layanan penggunaan *domain* dan *sub domain* pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;

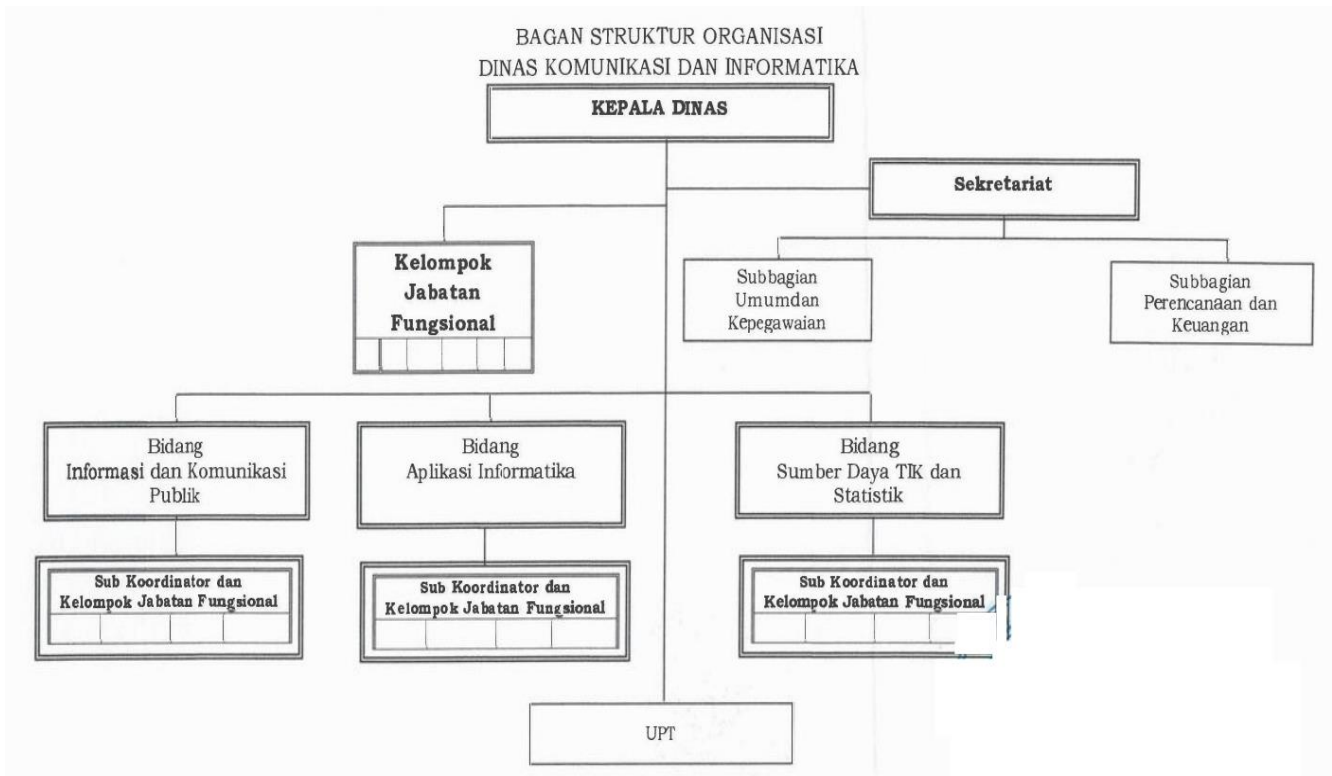
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika bidang

- statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan informatika , bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kab.Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan amanah yang diemban Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bangkalan didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang komunikasi dan informatika ;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi ;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan ;
- f. Pengelolaan barang milik daerah ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program perencanaan bidang komunikasi dan informatika serta melakukan evaluasi dan pelaporan serta melakukan kegiatan tata usaha keuangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;

- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) membawahi seksi :

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2.1 Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan Informasi Publik, melaksanakan opini dan aspirasi publik, menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media massa dan media sosial, mengumpulkan pendapat umum, mengelola pengaduan masyarakat, mengelola kesekretariatan Komisi Informasi, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun dan melaksanakan standard pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP) serta melaksanakan Pengendalian Intern (SPI)

2.2 Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Mempunyai tugas menyusun Rencana dan anggaran di seksinya,

menyelenggarakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan pemerintah Daerah, mengolah dan menganalisis data informasi di lingkup nasional dan daerah serta lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, mengelola pelayanan informasi publik, melaksanakan layanan pengaduan masyarakat di tingkat kabupaten, melaksanakan DPA dan DPPA, Menyusun SP Dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

2.3 Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Mempunyai tugas menyusun rencana dan anggaran di seksinya, menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, melaksanakan pembuatan konten lokal, mengelola saluran komunikasi milik pemda/media internal, melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun SP dan SOP dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

3. Bidang Aplikasi Informatika (Aptika)

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang layanan Infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e- Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e- government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang aplikasi informatika;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan dibidang aplikasi informatika;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi informatika;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan aplikasi informatika;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang layanan bidang infrastruktur aplikasi informatika

Bidang Aplikasi Informatika membawahi seksi :

- 1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK
- 2. Seksi Pengembangan E- Government
- 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

3.1 Seksi Infrastruktur Jaringan TIK

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi infrastruktur jaringan TIK, menyelenggarakan layanan data center dan *disaster recovery center*, melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, meningkatkan SDM dalam Pengelolaan Infrastruktur dan TIK, Pengelolaan Internet Pemerintah dan publik, filtering konten negatif, melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, Melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan SOP Dan SPI.

3.2 Seksi Pengembangan E-Government

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksinya, menyelenggarakan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pemanfaatan Sistem Informasi pemerintahan dan system informasi public, melaksanakan layanan interkoneksi dan interoperabilitas, sebagai layanan Pusat Application Program Interface (API),

melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun dan melaksanakan SP dan SOP, serta melaksanakan SPI.

3.3 Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Mempunyai Tugas menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran sesuai Seksinya, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah, menyelenggarakan layanan Monitoring Trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, peningkatan SDM, layanan kemananan informasi pada system elektronik pemerintah daerah, melaksanakan audit TIK, menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif, melaksanakan layanan sistem persandian, menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tentang tata kelola persandian, melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun dan melaksanakan SP dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik Daerah (SD TIK)

Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan *goverment chief information officer* (GCIO) pemerimtah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program kerja bidang Sumber daya TIK, data dan statistik;
- b. Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya TIK, Data dan

Statistik;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik;
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Sumber daya TIK, Data dan statistik;
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik;
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang penguatan kapasitas Sumber Daya TIK, Data dan Statistik;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik membawahi seksi :

- 1. Seksi Sumber Daya TIK
- 2. Seksi Ekosistem TIK
- 3. Seksi Data dan statistik

4.1 Seksi Sumber daya TIK

Mempunyai tugas menyusun dan merencanakan kegiatan dan anggaran seksinya, menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, Pengembangan sumber daya Komunikasi, Melaksanakan Layanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Kabupaten, Peningkatan Kapasitas aparatur dalam Pengelolaan domain, Portal dan website, Peningkatan Kapasitas aparatur dalam bidang TIK, Peningkatan masyarakat dalam implementasi *e- government* dan *smart city*, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

4.2 Seksi Ekosistem TIK

Mempunyai tugas menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi ekosistem

TIK, menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-goverment* kabupaten, layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, layanan Pengembangan *Bussines* proses *reeginering* pelayanan dilingkungan pemerintah dan Non Pemerintah, melaksanakan layanan sistem informasi smart city, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksakan SP dan SOP, serta melaksanakan SPI.

4.3 Seksi Data dan Statistik

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi data dan statistik, melaksanakan penetapan standard format data dan informasi, Penetapan standard format statistik dan kebijakan, melaksanakan layanan recovery data dan informasi, melasanakan Pengelolaan data elektronik, Peningkatan kapasitas aparatur dalam Pengelolaan Data dan Statistik, melaksanakan DPA dan DPPA, Melaksanakan SP dan SOP, melakukan Sistem Pengedalian Intern (SPI).

2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya antara lain; sumber daya aparatur (SDM), sumber daya TIK, serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebanyak 111 orang. Dari sejumlah tersebut masih belum memenuhi kualifikasi teknis bidang komunikasi dan informatika. Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di bidang bidang:

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-3	1
2	S-2	4
3	S-1	33
4	D-III	6
5	SLTA/SMU	17
6	SLTP	0
	JUMLAH	61

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

Tabel 2.2
Susunan Tenaga Harian Lepas (THL)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	
2	S-1	14
3	D-III	
4	D-II	
5	D-I	
6	SLTA	35
7	SLTP	1
	JUMLAH	50 Orang

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

Tabel 2.3
Susunan Pegawai di Unit Pelayanan

No	Unit Kerja	PNS	THL	Jumlah
1	Radio SBFM	2	3	
2	Komisi Informasi	3		
3.	Desk PPID	2	2	
4.	Website PPID	2		
Jumlah		9	5	

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

Tabel 2.4
Data Kualifikasi Teknis Pegawai

No	Kualifikasi	Yang ada	Jumlah ideal	Kurang
1.	S-1 Informatika	2	30	28
2.	S-1 Komunikasi/Broadcast	-	20	20
3.	S-1 Elektro	1	10	9

	JUMLAH	3	60	57
--	---------------	----------	-----------	-----------

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

2.2.2 Aset/Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tidak hanya mengandalkan jumlah dan kualitas SDM Aparatur. Pelaksanaan tugas dan fungsi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan informasi dan komunikasi, informasi telematika, serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Sarana dan prasarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan diantaranya :

- 1. Server dengan kapasitas 6 tera (setara 6000 Gb);
- 2. Bandwich 100 MBps;
- 3. Menara NOC Jaringan intra pemda
- 4. Radio Suara Bangkalan FM 92,1 MHz;
- 5. Desk PPID Pemerintah Kabupaten Bangklalan;
- 6. Billboard/Media Luar Ruang;
- 7. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- 8. Kelompok Pertunjukan Rakyat;
- 9. Tabloid Lensa Madura;
- 10. Media Online www.bangkalankab.go.id;

11. Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan target dan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja pelayanan yang kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) untuk mengukur seberapa besar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam mencapai sasaran strategisnya adalah dengan melihat persentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Selain itu, dapat juga dilihat dengan membandingkan kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 2.1 terdapat 3 indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renstra 2018 - 2023. Yang pertama adalah persentase layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra Pemerintah Daerah mencapai 89,82%. Kedua adalah persentase jumlah berita dipublikasikan mencapai 96,34% yang mana telah memenuhi target capaian tahun 2022. Ketiga adalah persentase jumlah data statistic sectoral yang dihasilkan dengan capaian 87,17% di tahun 2022.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan diatas, berikut disampaikan pula pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Diskominfo Kabupaten Bangkalan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	-	-	-	2,733,853,050.00	1,762,497,008.50				2,433,663,106.00	1,634,306,108.00				89.02	92.73			
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan				250,856,700.00	100,295,595.50				1,420,641,916.00	1,446,749,244.00								
2		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan				1,378,959,850.00	1,455,127,000.00													
3	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan				5,000,000.00	-				250,665,088.00	39,015,313.00								
4		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan				275,797,100.00	39,015,313.00													
5	Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun				9,830,000.00	6,575,000.00				7,910,000.00	6,575,000.00								
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara				94,440,000.00	54,339,000.00				188,545,402.00	54,971,451.00								
7		Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara				115,000,000.00	5,000,000.00													
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan				-	47,995,100.00					47,995,100.00								
9		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	-	-	-	310,743,500.00	-				288,199,200.00									
10	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan				100,000,000.00	-				93,000,000.00									
11	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	95,892,500.00	-				95,594,000.00									
12	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				25,384,650.00	9,400,000.00				34,474,000.00	15,050,000.00								
13		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	-	-	-	10,250,750.00	9,150,000.00													

1 4		Jumlah dokumen data dan informasi				250,000.00	6,200,000.00												
1 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)				11,430,500.00	13,500,000.00				22,299,500.00	16,900,000.00							
1 6		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun				11,629,250.00	7,900,000.00												
1 7	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester				-	8,000,000.00					7,050,000.00							
1 8		jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				8.388.250	-				8,334,000.00								
1 9	Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten / Provinsi	Peringatan hari jadi Kota Bangkalan				30.000.000	-				24,000,000.00								
B	Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah				1,207,397,200.00	1,065,434,000.00				1,152,774,393.00	1,028,239,000.00				95.48	96.51		
2 0	pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola				141,750,000.00	96,000,000.00				1,014,784,516.00	928,350,000.00							
2 1		jumlah jaringan yang terpasang				886,200,000.00	830,845,000.00												
2 2		jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan				36,600,000.00	38,700,000.00												
2 3	pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia				97,737,100.00	92,475,000.00				94,437,100.00	92,475,000.00							
2 4	pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi				37,477,600.00	-				43,552,777.00	7,414,000.00							
2 5		Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi				7,632,500.00	7,414,000.00												
C	Program pengembangan informasi dan	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui				2,013,204,750.00	2,053,080,850.00				1,914,093,550.00	1,988,807,498.00				95.08	96.87		

	komunikasi publik	jaringan radio																	
26	pengelolaan informasi publik	terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	-	-	-	239,950,000.00	-				269,035,446.00	20,655,000.00							
27		jumlah issue yang berhasil diangkat				21,506,000.00	6,750,000.00												
28		jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	-	-	-	45,302,500.00	12,100,000.00												
29		jumlah pembinaan KIM				-	-												
30	fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	-	-	-	163,600,000.00	87,612,500.00				163,100,000.00	87,612,500.00							
31	pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti				54,775,000.00	-				757,410,909.00	1,277,773,998.00							
32		jumlah informasi yang di expose				-	133,800,000.00												
33		jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan				24,381,250.00	-												
34		jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	-	-	-	683,090,000.00	1,103,320,350.00												
35		jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara				15,000,000.00	90,000,000.00												
36	pengelolaan dan operasional komisi informai	operasional komisi informasi				430,310,000.00	474,524,000.00				403,294,000.00	470,372,000.00							
37	pengelolaan media komunikai	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarakan				7,150,000.00	-				321,253,195.00	132,394,000.00							
38		jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat				40,550,000.00	-												
39		jumlah lensa madura yang diterbitkan				108,990,000.00	29,600,000.00												
40		jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio				109,100,000.00	112,894,000.00												
41		kajian akademis LPPL	-	-	-	69,500,000.00	-												
D	Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah	jumlah jenis data statistik yang tersedia				227,195,000.00	131,578,800.00				217,074,900.00	130,890,000.00				95.55	99.48		

4 2	pengembangan sumber daya TIK	jumlah komunitas melawan TIK				43,000,000.00	-					65,000,000.00	17,550,000.00						
4 3		Jumlah aparaturn peserta pelatihan survey				22,000,000.00	17,550,000.00												
4 4	pengembangan ekosistem TIK	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	-	-	-	34,672,500.00	-					62,095,000.00	27,370,000.00						
4 5		jumlah aparaturn yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik				27,522,500.00	27,370,000.00												
4 6	penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	dokumen metadata dan statistik sektoral daerah yang tersajikan				100,000,000.00	86,658,800.00					89,979,900.00	85,970,000.00						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th.2020																			
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah						1,933,682,495.00	3,939,448,150.00	1,661,450,000.00			1,823,942,425.00	3,538,242,004.00	-			94.32	89.82
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan portal web resmi						1,929,626,995.00	3,750,648,150.00	1,500,000,000.00			1,820,285,675.00	3,357,090,475.00	-				
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah						1,929,626,995.00		1,500,000,000.00			1,820,285,675.00						
	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	jumlah jaringan yang terpasang							3,750,648,150.00				3,357,090,475.00						
		jumlah lisensi aplikasi yg dihasilkan																	
		jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan																	
		jumlah perangkat yg dihasilkan																	
		jumlah website resmi yang dikelola																	

	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan aplikasi informatika					4,055,500.00	188,800,000.00	161,450,000.00			3,656,750.00	181,151,529.00	-					
	penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemrintah daerah Kab/Kota	jumlah aplikasi yg dihasilkan					4,055,500.00	188,800,000.00	-			3,656,750.00	181,151,529.00						
		sosialisasi aplikasi integrasi																	
	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					-	-	161,450,000.00										
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase pengamanan informasi persandian					25,498,750.00	171,072,000.00	40,390,000.00			10,366,400.00	165,465,462.00	-			40.65	96.72	-
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan informasi					25,498,750.00	171,072,000.00	40,390,000.00			10,366,400.00	165,465,462.00	-					
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					5,498,750.00	-	-			5,498,400.00							
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					20,000,000.00	171,072,000.00	40,390,000.00			4,868,000.00	165,465,462.00						
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah berita dipublikasikan					2,764,753,150.00	2,595,734,464.00	1,530,814,000.00			2,673,435,000.00	2,500,728,481.00	-			96.70	96.34	-
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2,764,753,150.00	2,595,734,464.00	1,530,814,000.00			2,673,435,000.00	2,500,728,481.00	-					
	Monitoring informasi dan penetapan agenda	jumlah mediia sosial yg dilaksanakan dan dipelihara					1,875,992,150.00	1,697,208,384.00	1,000,000,000.00			1,838,605,000.00	1,674,838,681.00						

	prioritas komunikasi pemerintah daerah																		
		jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi																	
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan						-	-	-									
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					445,241,000.00	388,799,950.00	174,664,000.00			434,741,000.00	388,569,500.00						
	Manajemen komunikasi krisis	jumlah issue yang berhasil diangkat					-	20,000,000.00	-			-	18,300,000.00						
		jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti																	
	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					-	-	6,150,000.00			-							
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah					443,520,000.00	489,726,130.00	350,000,000.00			400,089,000.00	419,020,300.00						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan					125,000,000.00	111,759,650.00	15,300,000.00			124,650,000.00	97,422,775.00	-			99.72	87.17	-
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/ Kabupaten Kota					125,000,000.00	111,759,650.00	15,300,000.00			124,650,000.00	97,422,775.00	-					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					75,000,000.00	20,104,650.00	5,250,000.00			74,700,000.00	12,397,450.00						
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					-	34,560,850.00	4,800,000.00				31,746,325.00						

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS					50,000,000.00	57,094,150.00	5,250,000.00			49,950,000.00	53,279,000.00						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan					7,703,256,285.00	7,552,138,982.00	6,429,530,400.00			7,400,210,047.00	7,185,251,628.00	-			96.07	95.14	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,578,200.00	37,812,100.00	27,492,500.00			4,985,750.00	30,584,250.00	-					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2,000,000.00	11,906,300.00	5,642,000.00			1,773,000.00	9,585,000.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					818,000.00	4,603,250.00	3,629,500.00			696,000.00	4,563,500.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					500,000.00	5,863,250.00	3,692,000.00			498,750.00	5,143,500.00						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					760,200.00	4,051,250.00	3,606,000.00			711,000.00	3,351,500.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					500,000.00	4,267,150.00	3,731,000.00			416,000.00	3,916,000.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					500,000.00	3,762,650.00	4,442,000.00			391,000.00	1,857,500.00						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500,000.00	3,358,250.00	2,750,000.00			500,000.00	2,167,250.00						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang					3,991,957,423.00	4,590,146,662.00	4,799,361,401.00			3,954,351,764.00	4,522,605,767.00	-					

		terpenuhi																	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					3,990,457,423.00	4,581,050,812.00	4,793,499,401.00			3,953,592,764.00	4,514,360,767.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					750,000.00	6,674,800.00	4,362,000.00			509,000.00	6,611,000.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					750,000.00	2,421,050.00	1,500,000.00			250,000.00	1,634,000.00						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun					-	2,290,000.00	800,000.00			-	2,264,000.00						
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					-	2,290,000.00	800,000.00			-	2,264,000.00						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana					1,543,401,973.00	473,378,100.00	-			1,374,318,994.00	440,089,700.00	-					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					-	64,341,100.00	-			-	49,420,850.00						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					103,268,423.00	-	-			102,705,000.00	-						
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					1,440,133,550.00	409,037,000.00	-			1,271,613,994.00	390,668,850.00						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					-	-	-										

	Undangan																		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						68,501,667.00	213,827,200.00	66,945,050.00			50,581,735.00	184,535,543.00	-				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						702,000.00	13,568,100.00	6,114,800.00			702,000.00	13,568,100.00					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						6,658,450.00	31,376,900.00	14,970,250.00			6,514,700.00	31,336,800.00					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						24,932,132.00	17,085,000.00	6,575,000.00			7,293,950.00	17,056,800.00					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						11,220,000.00	23,168,300.00	10,535,000.00			11,220,000.00	23,159,200.00					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						6,960,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00			6,840,000.00	6,960,000.00					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18,029,085.00	120,528,900.00	20,650,000.00			18,011,085.00	92,454,643.00					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana						209,280,250.00	222,869,870.00	-			207,665,745.00	220,919,870.00	-				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	21,813,870.00	-			-	21,813,870.00					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						209,280,250.00	201,056,000.00	-			207,665,745.00	199,106,000.00					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,652,792,903.00	1,621,305,000.00	1,414,046,000.00			1,605,976,226.00	1,435,340,384.00	-				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,966,000.00	12,500,000.00	6,500,000.00			3,966,000.00	10,992,000.00					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber						155,000,000.00	200,000,000.00	155,000,000.00			138,192,605.00	187,820,226.00					

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1,493,826,903.00	1,408,805,000.00	1,252,546,000.00			1,463,817,621.00	1,236,528,158.00						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana					231,743,869.00	390,510,050.00	120,885,449.00			202,329,833.00	348,912,114.00	-					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					150,977,569.00	197,910,000.00	100,985,449.00			121,883,833.00	157,902,623.00						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					65,116,300.00	162,770,050.00	8,500,000.00			64,896,000.00	161,519,491.00						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					15,650,000.00	29,830,000.00	11,400,000.00			15,550,000.00	29,490,000.00						

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	2,733,853,050.00	1,762,497,008.50				2,433,663,106.00	1,634,306,108.00				89.02	92.73								
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	250,856,700.00	100,295,595.50				1,420,641,916.00	1,446,749,244.00													
	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	1,378,959,850.00	1,455,127,000.00																		
Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	5,000,000.00	-				250,665,088.00	39,015,313.00													
	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	275,797,100.00	39,015,313.00																		
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	9,830,000.00	6,575,000.00				7,910,000.00	6,575,000.00													
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	94,440,000.00	54,339,000.00				188,545,402.00	54,971,451.00													
	Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara	115,000,000.00	5,000,000.00																		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	-	47,995,100.00					47,995,100.00													
	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	310,743,500.00	-				288,199,200.00														
Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100,000,000.00	-				93,000,000.00														
Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	95,892,500.00	-				95,594,000.00														
Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25,384,650.00	9,400,000.00				34,474,000.00	15,050,000.00													
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	10,250,750.00	9,150,000.00																		
	Jumlah dokumen data dan informasi	250,000.00	6,200,000.00																		

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	11,430,500.00	13,500,000.00				22,299,500.00	16,900,000.00												
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	11,629,250.00	7,900,000.00																	
Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/tri wulan/semester	-	8,000,000.00					7,050,000.00												
	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8.388.250	-				8,334,000.00													
Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten / Provinsi	Peringatan hari jadi Kota Bangkalan	30.000.000	-				24,000,000.00													
Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	1,207,397,200.00	1,065,434,000.00				1,152,774,393.00	1,028,239,000.00				95.48	96.51							
pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola	141,750,000.00	96,000,000.00				1,014,784,516.00	928,350,000.00												
	jumlah jaringan yang terpasang	886,200,000.00	830,845,000.00																	
	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	36,600,000.00	38,700,000.00																	
pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	97,737,100.00	92,475,000.00				94,437,100.00	92,475,000.00												
pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi	37,477,600.00	-				43,552,777.00	7,414,000.00												
	Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi	7,632,500.00	7,414,000.00																	
Program pengembangan informasi dan komunikasi publik	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	2,013,204,750.00	2,053,080,850.00				1,914,093,550.00	1,988,807,498.00				95.08	96.87							

pengelolaan informasi publik	terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	239,950,000.00	-				269,035,446.00	20,655,000.00												
	jumlah issue yang berhasil diangkat	21,506,000.00	6,750,000.00																	
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	45,302,500.00	12,100,000.00																	
	jumlah pembinaan KIM	-	-																	
fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	163,600,000.00	87,612,500.00				163,100,000.00	87,612,500.00												
pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti	54,775,000.00	-				757,410,909.00	1,277,773,998.00												
	jumlah informasi yang di expose	-	133,800,000.00																	
	jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan	24,381,250.00	-																	
	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	683,090,000.00	1,103,320,350.00																	
	jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	15,000,000.00	90,000,000.00																	
pengelolaan dan operasional komisi informai	operasional komisi informasi	430,310,000.00	474,524,000.00				403,294,000.00	470,372,000.00												
pengelolaan media komunikasi	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarkan	7,150,000.00	-				321,253,195.00	132,394,000.00												
	jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	40,550,000.00	-																	
	jumlah lensa madura yang diterbitkan	108,990,000.00	29,600,000.00																	
	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	109,100,000.00	112,894,000.00																	
	kajian akademis LPPL	69,500,000.00	-																	
Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah	jumlah jenis data statistik yang tersedia	227,195,000.00	131,578,800.00				217,074,900.00	130,890,000.00				95.55	99.48							
pengembangan sumber daya TIK	jumlah komunitas relawan TIK	43,000,000.00	-				65,000,000.00	17,550,000.00												

	Jumlah aparatur peserta pelatihan survey	22,000,000.00	17,550,000.00																
pengembangan ekosistem TIK	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	34,672,500.00	-				62,095,000.00	27,370,000.00											
	jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	27,522,500.00	27,370,000.00																
penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	dokumen metadata dan statistik sektoral daerah yang tersajikan	100,000,000.00	86,658,800.00				89,979,900.00	85,970,000.00											
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah			1,933,682,495.00	3,939,448,150.00	1,661,450,000.00			1,823,942,425.00	3,538,242,004.00	-			94.32	89.82	-		0.06	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan portal web resmi			1,929,626,995.00	3,750,648,150.00	1,500,000,000.00			1,820,285,675.00	3,357,090,475.00	-								
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah			1,929,626,995.00		1,500,000,000.00			1,820,285,675.00										
penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	jumlah jaringan yang terpasang				3,750,648,150.00					3,357,090,475.00									
	jumlah lisensi aplikasi yg dihasilkan																		
	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan																		
	jumlah perangkat yg dihasilkan																		
	jumlah website resmi yang dikelola																		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Pengembangan aplikasi informatika			4,055,500.00	188,800,000.00	161,450,000.00			3,656,750.00	181,151,529.00	-								

Kabupaten/Kota																				
penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kab/Kota	jumlah aplikasi yg dihasilkan			4,055,500.00	188,800,000.00	-			3,656,750.00	181,151,529.00										
	sosialisasi aplikasi integrasi																			
pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			-	-	161,450,000.00														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase pengamanan informasi persandian			25,498,750.00	171,072,000.00	40,390,000.00			10,366,400.00	165,465,462.00	-			40.65	96.72	-				
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan informasi			25,498,750.00	171,072,000.00	40,390,000.00			10,366,400.00	165,465,462.00	-									
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			5,498,750.00	-	-			5,498,400.00											
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			20,000,000.00	171,072,000.00	40,390,000.00			4,868,000.00	165,465,462.00										
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah berita dipublikasikan			2,764,753,150.00	2,595,734,464.00	1,530,814,000.00			2,673,435,000.00	2,500,728,481.00	-			96.70	96.34	-				
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,764,753,150.00	2,595,734,464.00	1,530,814,000.00			2,673,435,000.00	2,500,728,481.00	-									

Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	jumlah media sosial yg dilaksanakan dan dipelihara			1,875,992,150.00	1,697,208,384.00	1,000,000,000.00			1,838,605,000.00	1,674,838,681.00										
	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi																			
Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			-	-	-														
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			445,241,000.00	388,799,950.00	174,664,000.00			434,741,000.00	388,569,500.00										
Manajemen komunikasi krisis	jumlah issue yang berhasil diangkat			-	20,000,000.00	-			-	18,300,000.00										
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti																			
Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-	-	6,150,000.00			-											
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			443,520,000.00	489,726,130.00	350,000,000.00			400,089,000.00	419,020,300.00										
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan			125,000,000.00	111,759,650.00	15,300,000.00			124,650,000.00	97,422,775.00	-			99.72	87.17	-				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/ Kabupaten Kota			125,000,000.00	111,759,650.00	15,300,000.00			124,650,000.00	97,422,775.00	-									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			75,000,000.00	20,104,650.00	5,250,000.00			74,700,000.00	12,397,450.00										
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			-	34,560,850.00	4,800,000.00				31,746,325.00										

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			50,000,000.00	57,094,150.00	5,250,000.00			49,950,000.00	53,279,000.00										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan			7,703,256,285.00	7,552,138,982.00	6,429,530,400.00			7,400,210,047.00	7,185,251,628.00	-			96.07	95.14	-				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,578,200.00	37,812,100.00	27,492,500.00			4,985,750.00	30,584,250.00	-									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,000,000.00	11,906,300.00	5,642,000.00			1,773,000.00	9,585,000.00										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			818,000.00	4,603,250.00	3,629,500.00			696,000.00	4,563,500.00										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500,000.00	5,863,250.00	3,692,000.00			498,750.00	5,143,500.00										
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			760,200.00	4,051,250.00	3,606,000.00			711,000.00	3,351,500.00										
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			500,000.00	4,267,150.00	3,731,000.00			416,000.00	3,916,000.00										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			500,000.00	3,762,650.00	4,442,000.00			391,000.00	1,857,500.00										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500,000.00	3,358,250.00	2,750,000.00			500,000.00	2,167,250.00										

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			3,991,957,423.00	4,590,146,662.00	4,799,361,401.00			3,954,351,764.00	4,522,605,767.00	-									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3,990,457,423.00	4,581,050,812.00	4,793,499,401.00			3,953,592,764.00	4,514,360,767.00										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			750,000.00	6,674,800.00	4,362,000.00			509,000.00	6,611,000.00										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD			750,000.00	2,421,050.00	1,500,000.00			250,000.00	1,634,000.00										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun			-	2,290,000.00	800,000.00			-	2,264,000.00										
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	2,290,000.00	800,000.00			-	2,264,000.00										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			1,543,401,973.00	473,378,100.00	-			1,374,318,994.00	440,089,700.00	-									
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	64,341,100.00	-			-	49,420,850.00										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			103,268,423.00	-	-			102,705,000.00	-										
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1,440,133,550.00	409,037,000.00	-			1,271,613,994.00	390,668,850.00										
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi			-	-	-														

Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan																			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			68,501,667.00	213,827,200.00	66,945,050.00			50,581,735.00	184,535,543.00	-									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			702,000.00	13,568,100.00	6,114,800.00			702,000.00	13,568,100.00										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6,658,450.00	31,376,900.00	14,970,250.00			6,514,700.00	31,336,800.00										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24,932,132.00	17,085,000.00	6,575,000.00			7,293,950.00	17,056,800.00										
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			11,220,000.00	23,168,300.00	10,535,000.00			11,220,000.00	23,159,200.00										
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			6,960,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00			6,840,000.00	6,960,000.00										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18,029,085.00	120,528,900.00	20,650,000.00			18,011,085.00	92,454,643.00										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			209,280,250.00	222,869,870.00	-			207,665,745.00	220,919,870.00	-									
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	21,813,870.00	-			-	21,813,870.00										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			209,280,250.00	201,056,000.00	-			207,665,745.00	199,106,000.00										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,652,792,903.00	1,621,305,000.00	1,414,046,000.00			1,605,976,226.00	1,435,340,384.00	-									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,966,000.00	12,500,000.00	6,500,000.00			3,966,000.00	10,992,000.00										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			155,000,000.00	200,000,000.00	155,000,000.00			138,192,605.00	187,820,226.00										

	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1,493,826,903.00	1,408,805,000.00	1,252,546,000.00			1,463,817,621.00	1,236,528,158.00										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			231,743,869.00	390,510,050.00	120,885,449.00			202,329,833.00	348,912,114.00	-									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			150,977,569.00	197,910,000.00	100,985,449.00			121,883,833.00	157,902,623.00										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			65,116,300.00	162,770,050.00	8,500,000.00			64,896,000.00	161,519,491.00										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15,650,000.00	29,830,000.00	11,400,000.00			15,550,000.00	29,490,000.00										

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian serta sarana dan prasarana	Semua Bidang-bidang lingkup Diskominfo Kabupaten Bangkalan;
			Instansi Vertikal;
			Pegawai lingkup Diskominfo Kab. Bangkalan;
			Masyarakat
2	Aplikasi Informatika	Pelayanan infrastruktur jaringan TIK, Pengembangan E-Government, Keamanan Informasi dan Persandian	Diskominfo, SKPD Lingkup Kabupaten Bangkalan
			Masyarakat
3	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik	Diskominfo
			PWI
			Masyarakat
4	Sumber Daya TIK	Pelayanan sumber daya TIK, Ekosistem TIK, Data dan statistik	Diskominfo, SKPD Lingkup Kabupaten Bangkalan, Masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika adalah terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai pada masa datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan bidang kominfo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan ini dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, seperti pada tabel berikut :

Table 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan informasi belum memenuhi harapan masyarakat.	1. Kualitas infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra dan internet Pemerintah Daerah yang masih perlu ditingkatkan. 2. Perangkat daerah belum konsisten untuk mengisi konten website sebagai upaya penyebarluasan informasi 3. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK.	1. Keterbatasan anggaran yang berbasis TIK di Diskominfo. 2. Kurangnya koordinasi terhadap PD dalam hal penyebarluasan informasi. 3. Pengembangan pelayanan yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan.
2	Kinerja sebagai <i>regulator</i> dan <i>integrator</i> TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi belum optimal.	1. Rendahnya pengetahuan ASN tentang pentingnya peran TIK dalam pemerintahan. 2. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE.	1. Belum dilakukan program pelatihan <i>softskill</i> terkait <i>transformasi leadership</i>. 2. Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur TIK masih rendah.

3	Peran sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Kesenjangan data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan	1. Perubahan alur penyedia data disebabkan otonomi. 2. Ego Sektoral.
---	--	--	---

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

N o	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemkominfo	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia	1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi publik	1. Kualitas infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah yang masih perlu ditingkatkan	1. Keterbatasan anggaran yang berbasis TIK di Diskominfo	1. Perkembangan teknologi dan informasi
2	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	2. Meningkatnya manajemen TIK menuju East Java Smart Province 3. Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang dipublikasikan	2. Perangkat daerah belum konsisten untuk mengisi konten website sebagai upaya penyebaran informasi	2. Kurangnya koordinasi terhadap PD dalam hal penyebaran informasi 3. Pengembangan pelayanan yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan	2. Kebijakan pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Diskominfo 3. Telah dikembangkan Integrasi Jaringan semua OPD melalui jaringan internet/intranet serta pengembangan sistem informasi secara online melalui website
3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif		3. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK		

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Kabupaten Bangkalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tetapi sangat signifikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bergulirnya Revolusi Industry 4.0. telah merubah tatanan dunia termasuk Indonesia. Dampaknya terjadi semangat dan inisiatif untuk merubah birokrasi pemerintah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Melalui TIK beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia terbukti mampu menyajikan proses administrasi lebih efektif dan efisien serta mampu menyajikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. *Trend* pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Kabupaten Cerdas (*Smart District*), Desa Cerdas (*Smart Village*) bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan Provinsi Cerdas dengan program *East Java Smart Province* adalah wujud dari kreatifitas dan inovasi yang bertujuan memberikan kenyamanan dan layanan prima kepada masyarakat dengan bantuan TIK.

Diantara teknologi masa depan yang dapat mempengaruhi perkembangan pemanfaatan TIK di pemerintahan diantaranya :

- 1) *Mobile Internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, maka

layanan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.

- 2) *Cloud Computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan pemerintah diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna.
- 4) *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, tidak berpola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan teknologi ini diharapkan mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 5) *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI berpotensi membantu pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan tulisan/suara, dan membuat draf dokumen.

Selain itu dampak kemajuan teknologi informasi telah memunculkan kesadaran warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah merespon dengan kebijakan bahwa setiap K/L/D wajib menyajikan informasi yang menjadi ranah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara internal birokrasi pemerintah telah bertransformasi dalam beberapa proses bisnis, seperti proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara elektronik, perijinan online, pengaduan online, dan beberapa proses bisnis lainnya telah dilakukan secara online. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui SPBE pemerintah berharap pada akhir tahun 2025 ada keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan keterpaduan maka akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi sehingga akan terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar TIK, mendorong terciptanya ekosistem TIK, serta bersama-sama dengan Bagian Organisasi membangun tata kelola SPBE.

Khusus yang bersentuhan dengan RT/RW terkait tugas tambahan sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan telah memberlakukan sistem informasi *cellplan* sebagai alat kendali dan pengawasan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang masih berbasis nirkabel dibutuhkan ruang untuk pembangunan tower monopole. Pada waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan penggunaan *fiber optik* yang juga memerlukan pemanfaatan RT/RW.

3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian yang mutlak dalam suatu proses perencanaan. Kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, diterima oleh pihak terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis pada permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian/lembaga maka dapat disusun isu- isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut :

3.4.1 Isu - Isu Bidang Sumber Daya Manusia

- a. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (*leadership commitment*) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.
- b. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif.
- c. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multimedia, desain grafis, jurnalistik, serta dasar - dasar ilmu komunikasi lainnya.

3.4.2 Isu - Isu Bidang Suprastruktur dan Infrastruktur

- a. *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat.
- b. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan

masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social.

- c. Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.
- d. Kapasitas Bandwidth yang masih tergolong kecil berpengaruh pada distribusi jaringan yang mana jangkauan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak sampai ke desa – desa.
- e. Keterbatasan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam RPD Tahun 2024 - 2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yaitu **Indeks SPBE**.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek serta 47 (empat puluh tujuh) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	4	10%
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
	Penyelenggara SPBE	2	5%
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
	Pelaksanaan Audit TIK	3	4,50%
Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,50%
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1. Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2. Terkelola	- Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi - Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3. Terdefinisi	- Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi - Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi
4. Terpadu dan Terukur	- Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi - Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE
5. Optimum	- Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. - Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Tabel 4.3
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Layanan

Tingkat	Kriteria
1.Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2.Interaksi	- Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi - Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3.Transaksi	- Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi - Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE
4.Kolaborasi	- Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi - Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
5.Optimum	- Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi - Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika beserta penjabaran kinerja dan juga target (*cascading*) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Diskominfo

Tujuan						Sasaran								Ket ·
Uraian	Indikator Kinerja	target				Uraian	Indikator Kinerja	target						
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027			
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5 B	2,75 B	3 B	3 B	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	20%	22%	22%			
						Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100 %	100 %	100 %	100%			
							Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%	44%	88%	88%			
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	50%	75%	75%			
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60%	61%	62%	62%			
							Indeks kepuasan masyarakat	85%	87%	90%	90%			

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					85%	9,677,484,400	85%	10,196,854,402	85%	10,171,854,402	85%	10,379,354,402
2		Nilai Sakip PD				60%		60%		61%		62%	
		Indeks kepuasan masyarakat				85%		85%		87%		90%	
3			Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah			85%	6,429,530,400	85%	6,610,350,402	87%	6,685,350,402	90%	6,692,850,402
4				Persentase tersusunnya Perencanaan, penganggaran dan evauasi kinerja perangkat daerah		100%	27,492,500	100%	24,358,449	100%	24,358,449	100%	24,358,449
5					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,642,000	3 dokumen	5,017,000	2 dokumen	5,017,000	2 dokumen	5,017,000

6					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,629,500	1 dokumen	3,293,500	1 dokumen	3,293,500	1 dokumen	3,293,500
7					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,692,000	1 dokumen	3,692,000	1 dokumen	3,692,000	1 dokumen	3,692,000
8					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,606,000	1 dokumen	3,370,449	1 dokumen	3,370,449	1 dokumen	3,370,449
9					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,731,000	1 dokumen	3,356,000	1 dokumen	3,356,000	1 dokumen	3,356,000
10					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4,442,000	1 laporan	3,692,000	1 laporan	3,692,000	1 laporan	3,692,000
11					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2,750,000	1 laporan	1,937,500	1 laporan	1,937,500	1 laporan	1,937,500
12				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi		100%	4,799,361,401	100%	4,895,645,402	100%	4,930,645,402	100%	4,913,145,402
13					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	4,793,499,401	63 orang/bulan	4,890,869,402	63 orang/bulan	4,925,869,402	63 orang/bulan	4,908,369,402

14					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4,362,000	1 laporan	3,776,000	1 laporan	3,776,000	1 laporan	3,776,000
15					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 laporan	1,500,000	66 laporan	1,000,000	66 laporan	1,000,000	66 laporan	1,000,000
16				Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	800,000	100%	800,000	100%	800,000	100%	800,000
17					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000
18				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terlaksana		0%	-	80%	6,000,000	80%	6,000,000	80%	6,000,000
19					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	128 paket	1,000,000	128 paket	1,000,000	128 paket	1,000,000
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000

21				Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah		100%	66,945,050	100%	63,705,050	100%	63,705,050	100%	63,705,050
22					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6,114,800	12 paket	6,114,800	12 paket	6,114,800	12 paket	6,114,800
23					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	14,970,250	12 paket	14,970,250	12 paket	14,970,250	12 paket	14,970,250
24					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6,575,000	12 paket	6,575,000	12 paket	6,575,000	12 paket	6,575,000
25					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10,535,000	1 paket	10,535,000	1 paket	10,535,000	1 paket	10,535,000
26					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	8,100,000	12 dokumen	4,860,000	12 dokumen	4,860,000	12 dokumen	4,860,000
27					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	20,650,000	50 laporan	20,650,000	50 laporan	20,650,000	50 laporan	20,650,000
28				Persentase pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah yang terlaksana		0%	-	80%	2,910,052	80%	2,910,052	80%	2,910,052
29					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	1 unit	1,000,000	1 unit	1,000,000	1 unit	1,000,000
30					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	2 unit	1,910,052	2 unit	1,910,052	2 unit	1,910,052

31				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		80%	1,414,046,000	80%	1,496,046,000	80%	1,536,046,000	80%	1,561,046,000
32					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6,500,000	1 laporan	6,500,000	1 laporan	6,500,000	1 laporan	6,500,000
33					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	155,000,000	3 laporan	312,000,000	3 laporan	312,000,000	3 laporan	312,000,000
34					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1,252,546,000	5 laporan	1,177,546,000	5 laporan	1,217,546,000	5 laporan	1,242,546,000
35				Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		80%	120,885,449	80%	120,885,449	80%	120,885,449	80%	120,885,449
36					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	100,985,449	21 unit	100,985,449	21 unit	100,985,449	21 unit	100,985,449
37					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8,500,000	3 unit	8,500,000	3 unit	8,500,000	3 unit	8,500,000
38					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	11,400,000	25 unit	11,400,000	25 unit	11,400,000	25 unit	11,400,000

39			Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik			100%	1,530,814,000	100%	1,480,814,000	100%	1,430,814,000	100%	1,530,814,000
40				Jumlah Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	1,530,814,000	100%	1,480,814,000	100%	1,430,814,000	100%	1,530,814,000
41					jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	1,000,000,000	1 dokumen	750,000,000	1 dokumen	900,000,000	1 dokumen	1,000,000,000
42					jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 dokumen	174,664,000	12 dokumen	374,664,000	12 dokumen	174,664,000	12 dokumen	174,664,000
43					jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 dokumen	6,150,000	12 dokumen	6,150,000	12 dokumen	6,150,000	12 dokumen	6,150,000
44					jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	12 bulan	350,000,000	12 dokumen	350,000,000	12 dokumen	350,000,000	12 dokumen	350,000,000
47			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			15%	1,661,450,000	18%	2,050,000,000	20%	2,000,000,000	22%	2,100,000,000
48				Terlaksananya sistem jaringan intra pemerintah daerah		15%	1,500,000,000	18%	1,800,000,000	20%	1,800,000,000	22%	1,800,000,000
49					jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 paket	1,500,000,000	3 unit	1,800,000,000	3 unit	1,800,000,000	3 unit	1,800,000,000

					jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	210 menara							
					jumlah website resmi yang dikelola	2 website							
54				Terlaksananya sosialisasi aplikasi tnde		15%	161,450,000	18%	250,000,000	20%	200,000,000	22%	300,000,000
55					jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	1 aplikasi	161,450,000	2 unit	250,000,000	2 unit	200,000,000	2 unit	300,000,000
56					jumlah sosialisasi yang diadakan	1 kegiatan							
57			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			20%	15,300,000	22%	15,300,000	50%	15,300,000	75%	15,300,000
58				Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah/Kabupaten Kota		20%	15,300,000	22%	15,300,000	50%	15,300,000	75%	15,300,000
59					jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,250,000

60					jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	61 orang	4,800,000	61 orang	4,800,000	61 orang	4,800,000	61 orang	4,800,000
61					jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	61 orang	5,250,000	61 orang	5,250,000	61 orang	5,250,000	61 orang	5,250,000
62			Persentase keamanan informasi pemerintah daerah			20%	40,390,000	22%	40,390,000	44%	40,390,000	88%	40,390,000
63				Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Informasi		20%	40,390,000	22%	40,390,000	44%	40,390,000	88%	40,390,000
65					jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	40,390,000	61 PD	40,390,000	61 PD	40,390,000	61 PD	40,390,000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Dalam mengembangkan tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang di dalam RPD Tahun 2024-2026. Penetapan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dari hasil pertimbangan tersebut ditetapkan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan:

1. Meningkatkan layanan public yang diselenggarakan secara online serta mengembangkan aplikasi yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup dan meningkatkan diseminasi informasi melalui media informasi;
3. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada PD;

4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Kab. Bangkalan.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, antara lain :

1. Mengoptimalkan layanan publik yang berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi;
2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam keterbukaan informasi dan meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang keterbukaan informasi publik;
3. Standard keamanan informasi bagi PD;
4. Mengoptimalkan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
5. Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kab. Bangkalan.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

Isu Strategis :			
VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal		
MISI	Ke-2 Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi		
Tujuan RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan		
Sasaran RPD	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan layanan publik yang diselenggarakan secara online serta mengembangkan aplikasi yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengoptimalkan layanan publik yang berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi oleh PD
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup dan meningkatkan diseminasi informasi melalui media informasi	Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam keterbukaan informasi dan meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang keterbukaan informasi publik
		Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada PD	Standard keamanan informasi bagi PD
		Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka menjalankan urusan wajib bidang lingkungan hidup serta untuk mewujudkan dan mencapai tujuan, sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dan dengan memperhatikan strategi serta arah kebijakan maka telah disusun rencana program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13 Th. 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana atau kombinasi daripada kesemua jenis sumber daya tersebut.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Indikator kinerja serta Pendanaan Indikatif akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD. Diskominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				Kinerja Program		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)												
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		15%	18%	2,050,000,000	20%	2,000,000,000	22%	2,100,000,000	22%	6,150,000,000		
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	15%	18%	1,800,000,000	20%	1,800,000,000	22%	1,800,000,000	22%	5,400,000,000	Diskominfo Bkln	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunkana akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	15%	18%	1,800,000,000	20%	1,800,000,000	22%	1,800,000,000	22%	5,400,000,000	Diskominfo Bkln	
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 paket	3 unit	1,800,000,000	3 unit	1,800,000,000	3 unit	1,800,000,000	9 unit	5,400,000,000	KABID APTIKA	
				jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	210 menara										
				jumlah website resmi yang dikelola	2 website										
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		15%	18%	250,000,000	20%	200,000,000	22%	300,000,000	22%	750,000,000		

		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15%	18%	250,000,000	20%	200,000,000	22%	300,000,000	22%	750,000,000		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	15%	18%	250,000,000	20%	200,000,000	22%	300,000,000	22%	750,000,000		
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	1 aplikasi	2 unit	250,000,000	2 unit	200,000,000	2 unit	300,000,000	6 unit	750,000,000		
				jumlah sosialisasi yang diadakan	1 kegiatan								-		
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		Persentase keamanan informasi pemerintah daerah		20%	22%	40,390,000	44%	40,390,000	88%	40,390,000	88%	121,170,000		
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20%	22%	40,390,000	44%	40,390,000	88%	40,390,000	88%	121,170,000	Diskominfo Bkln	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD	20%	22%	40,390,000	44%	40,390,000	88%	40,390,000	88%	121,170,000	Diskominfo Bkln	
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	61 PD	40,390,000	61 PD	40,390,000	61 PD	40,390,000	183 PD	121,170,000		
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik		100%	100%	1,480,814,000	100%	1,430,814,000	100%	1,530,814,000	100%	4,442,442,000		
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100%	100%	1,480,814,000	100%	1,430,814,000	100%	1,530,814,000	100%	4,442,442,000	Diskominfo Bkln	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	100%	100%	1,480,814,000	100%	1,430,814,000	100%	1,530,814,000	100%	4,442,442,000	Diskominfo Bkln	

		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	1 dokumen	750,000,000	1 dokumen	900,000,000	1 dokumen	1,000,000,000	3 dokumen	2,650,000,000	KASI PKP	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 dokumen	12 dokumen	374,664,000	12 dokumen	174,664,000	12 dokumen	174,664,000	36 dokumen	723,992,000		
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 dokumen	12 dokumen	6,150,000	12 dokumen	6,150,000	12 dokumen	6,150,000	36 dokumen	18,450,000		
		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	12 bulan	12 dokumen	350,000,000	12 dokumen	350,000,000	12 dokumen	350,000,000	36 dokumen	1,050,000,000		
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		20%	22%	15,300,000	50%	15,300,000	75%	15,300,000	75%	45,900,000		
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%	22%	15,300,000	50%	15,300,000	75%	15,300,000	75%	45,900,000	Diskominfo Bkln	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Statistik Di Lingkup Pd	20%	22%	15,300,000	50%	15,300,000	75%	15,300,000	75%	45,900,000	Diskominfo Bkln	
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,250,000	3 dokumen	15,750,000	KABID SDTIK	
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	61 orang	61 orang	4,800,000	61 orang	4,800,000	61 orang	4,800,000	183 orang	14,400,000		
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	61 orang	61 orang	5,250,000	61 orang	5,250,000	61 orang	5,250,000	183 orang	15,750,000		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika		Nilai Sakip PD		60%	60%		61%		62%		62%			
			Indeks kepuasan masyarakat		83%	85%		87%		90%		90%			

		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	85%	6,610,350,402	85%	6,685,350,402	85%	6,692,850,402	85%	19,988,551,206	Diskominfo Bkln	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	24,358,449	100%	24,358,449	100%	24,358,449	100%	73,075,347	Diskominfo Bkln	
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 dokumen	3 dokumen	5,017,000	2 dokumen	5,017,000	2 dokumen	5,017,000	7 dokumen	15,051,000	KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka-skpd	1 dokumen	1 dokumen	3,293,500	1 dokumen	3,293,500	1 dokumen	3,293,500	3 dokumen	9,880,500		
		2.16.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1 dokumen	1 dokumen	3,692,000	1 dokumen	3,692,000	1 dokumen	3,692,000	3 dokumen	11,076,000		
		2.16.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa-skpd	1 dokumen	1 dokumen	3,370,449	1 dokumen	3,370,449	1 dokumen	3,370,449	3 dokumen	10,111,347		
		2.16.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	1 dokumen	1 dokumen	3,356,000	1 dokumen	3,356,000	1 dokumen	3,356,000	3 dokumen	10,068,000		
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 laporan	1 laporan	3,692,000	1 laporan	3,692,000	1 laporan	3,692,000	3 laporan	11,076,000		
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	1,937,500	1 laporan	1,937,500	1 laporan	1,937,500	3 laporan	5,812,500		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	100%	4,895,645,402	100%	4,930,645,402	100%	4,913,145,402	100%	14,739,436,206		
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan	63 orang/bulan	4,890,869,402	63 orang/bulan	4,925,869,402	63 orang/bulan	4,908,369,402	189 org/bln	14,725,108,206		
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	1 laporan	3,776,000	1 laporan	3,776,000	1 laporan	3,776,000	3 laporan	11,328,000		

		2.16.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/smesesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan/triwulanan/smesesteran skpd	66 laporan	66 laporan	1,000,000	66 laporan	1,000,000	66 laporan	1,000,000	198 laporan	3,000,000		
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	800,000	100%	800,000	100%	800,000	100%	2,400,000		
		2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	14 laporan	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	42 laporan	2,400,000		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	0%	80%	6,000,000	80%	6,000,000	80%	6,000,000	80%	18,000,000		
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		128 paket	1,000,000	128 paket	1,000,000	128 paket	1,000,000	384 paket	3,000,000		
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan		1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000	3 orang	7,500,000		
		2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000	1 orang	2,500,000	3 orang	7,500,000		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	63,705,050	100%	63,705,050	100%	63,705,050	100%	191,115,150		
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	6,114,800	12 paket	6,114,800	12 paket	6,114,800	36 paket	18,344,400		
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	14,970,250	12 paket	14,970,250	12 paket	14,970,250	36 paket	44,910,750		
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	6,575,000	12 paket	6,575,000	12 paket	6,575,000	36 paket	19,725,000		
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	10,535,000	1 paket	10,535,000	1 paket	10,535,000	3 paket	31,605,000		
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	4,860,000	12 dokumen	4,860,000	12 dokumen	4,860,000	36 dokumen	14,580,000		

		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	50 laporan	50 laporan	20,650,000	50 laporan	20,650,000	50 laporan	20,650,000	150 laporan	61,950,000		
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	0%	80%	2,910,052	80%	2,910,052	80%	2,910,052	80%	8,730,156		
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan		1 unit	1,000,000	1 unit	1,000,000	1 unit	1,000,000	3 unit	3,000,000		
		2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan		2 unit	1,910,052	2 unit	1,910,052	2 unit	1,910,052	6 unit	5,730,156		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	80%	1,496,046,000	80%	1,536,046,000	80%	1,561,046,000	80%	4,593,138,000		
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	6,500,000	1 laporan	6,500,000	1 laporan	6,500,000	3 laporan	19,500,000		
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	312,000,000	3 laporan	312,000,000	3 laporan	312,000,000	9 laporan	936,000,000		
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	5 laporan	1,177,546,000	5 laporan	1,217,546,000	5 laporan	1,242,546,000	15 laporan	3,637,638,000		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	80%	80%	120,885,449	80%	120,885,449	80%	120,885,449	80%	362,656,347		
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	21 unit	100,985,449	21 unit	100,985,449	21 unit	100,985,449	63 unit	302,956,347		
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	8,500,000	3 unit	8,500,000	3 unit	8,500,000	9 unit	25,500,000		
		2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	25 unit	11,400,000	25 unit	11,400,000	25 unit	11,400,000	75 unit	34,200,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disamping sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab terpenuhinya target Indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPD Kabupaten Bangkalan 2024 - 2026, juga berkewajiban memenuhi target 5 (lima) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan selama 3 (tiga) tahun mendatang yang tertulis pada tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja PD Diskominfo pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%	20%	22%	22%
2	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik		100%	100%	100%	100%
3	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah		22%	44%	88%	88%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		22%	50%	75%	75%
5	Nilai Sakip PD		60%	61%	62%	62%
6	Indeks kepuasan masyarakat		85%	87%	90%	90%

- Catatan :
Indikator 1 : Jumlah Satker 341 Unit, terdiri dari 34 PD, 18 Kecamatan, 10

Bagian, 8 Kelurahan, 271 Desa, 3 BUMD.

7.2 Tabel Indikator Kinerja Kunci Perangkat daerah

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
					2024		2025		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83	85	85	6,610,350,402	87	6,685,350,402	90	6,692,850,402	90	19,988,551,206
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase	100%	100%	100%	1,480,814,000	100%	1,430,814,000	100%	1,530,814,000	100%	4,442,442,000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	35%	15%	18%	250,000,000	20%	200,000,000	22%	300,000,000	22%	750,000,000
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	35%	15%	18%	1,800,000,000	20%	1,800,000,000	22%	1,800,000,000	22%	5,400,000,000

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	30%	30%	22%	15,300,000	50%	15,300,000	75%	15,300,000	75%	45,900,000
Program Penyelenggaraan Pengelolaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	35%	11%	22%	40,390,000	44%	40,390,000	88%	40,390,000	88%	121,170,000

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024–2026 mengacu pada pembangunan urusan komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2024 - 2026 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, seluruh bidang, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 3 (tiga) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024 - 2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indicator kinerja sasaran dan indicator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melalui Sekretariat dan Bidang-bidang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 merupakan indicator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 14 April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 198703 1 012